

ANALISIS KESENJANGAN IMPLEMENTASI KEBIJAKAN JAM BELAJAR MASYARAKAT PADA MASA PANDEMI DI KEMANTREN UMBULHARJO

GAP ANALYSIS OF THE IMPLEMENTATION OF JBM DURING THE PANDEMIC IN KEMANTREN UMBULHARJO

Oleh: Tri Indah Widianingsih, Universitas Negeri Yogyakarta
triindah.2018@student.uny.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan Implementasi kebijakan JBM pada Masa Pandemi di Kemantren Umbulharjo, faktor pendukung dan faktor penghambat, serta Menganalisis kesenjangan implementasi antar- kelurahan di Kemantren Umbulharjo. Metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Subjek penelitian ini ialah dinas, pendamping JBM, dan juga warga Kemantren Umbulharjo. Data analisis menggunakan model Miles dan Huberman yang terdiri dari kondensasi data, penyajian data, dan penarikan simpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Implementasi kebijakan JBM di Kemantren Umbulharjo di tiap kelurahan berbeda.; (2) Faktor pendukung implementasi ialah warga cenderung menerima keberadaan JBM dan juga adanya kerjasama dengan beberapa lembaga untuk pelaksanaan JBM pada masa pandemi. Sementara itu, faktor penghambat implementasi kebijakan JBM pada masa pandemi di Kemantren Umbulharjo ialah masih terdapatnya warga yang pasif di beberapa wilayah.; (3) Perbedaan implementasi tersebut menunjukkan bahwa terjadi kesenjangan antar-kelurahan di dalam Kemantren Umbulharjo.

Kata kunci: Analisis kesenjangan, implementasi JBM, kebijakan JBM

Abstract

This study aims to describe the implementation of the JBM policy during the Pandemic Period in Kemantren Umbulharjo, supporting factors and inhibiting factors in the implementation of community learning hours policies in Kemantren Umbulharjo, as well as analyze the gaps in implementation between villages in Kemantren Umbulharjo. The method used in this study is to use a descriptive qualitative approach with data collection techniques through interviews, observations, and documentation. The subjects of this study were the department, JBM assistants, and also residents of Kemantren Umbulharjo. The analysis data uses the Miles and Huberman model which consists of data condensation, data presentation, and conclusion drawing. Then test the validity of the data using triangulation of techniques and sources. The results of the study showed that (1) The implementation of the JBM policy in Kemantren Umbulharjo in each village was different. (2) The supporting factor for the implementation of JBM during the pandemic in Kemantren Umbulharjo is that residents tend to accept the existence of JBM and also the existence of cooperation with several institutions for the implementation of JBM during the pandemic. Meanwhile, the inhibiting factor in the implementation of the JBM policy during the pandemic in Kemantren Umbulharjo is that there are still passive residents in several areas and only rely on working groups for the implementation of JBM. (3) The difference in implementation shows that there is a gap between villages within the Umbulharjo Kemantren.

Keywords: Gap analysis, JBM implementation, JBM policy.

PENDAHULUAN

Jam Belajar Masyarakat hadir dari gagasan Bapak Wasis Siswanto B.A yang merasa iba ketika melihat anak-anaknya lebih senang menonton televisi daripada belajar. Lewat pemikiran dan keprihatinan beliaulah terwujud JBM ini. Kebijakan ini berdasar pada landasan hukum yaitu Surat Keputusan Gubernur DIY Nomor 93 Tahun 1999, tentang tentang jam belajar masyarakat yang berisikan bahwa Jam belajar masyarakat ialah upaya dalam menciptakan budaya belajar dengan membentuk suatu kondisi lingkungan yang ideal serta dapat mendukung proses belajar mengajar anak, dan dapat berlangsung dalam suasana aman, nyaman, tertib dan menyenangkan.

Berawal dari SK tersebut terbitlah pemberlakuan waktu pelaksanaan jam belajar masyarakat yaitu pada pukul 18.00-21.00 WIB, tetapi hal ini bukan berarti bahwa seluruh masyarakat dalam suatu Rukun Tetangga (RT) wajib melakukan kegiatan belajar seperti waktu yang telah ditentukan tersebut. Jam belajar berfungsi sebagai penegas bahwa masyarakat pada waktu yang telah ditentukan diarahkan untuk dapat menciptakan suasana yang menunjang dan kondusif untuk masyarakat dapat belajar dengan tenang dan nyaman serta menjauhkan kegiatan yang dapat menghambat kegiatan belajar tersebut.

Dengan demikian, sebenarnya pola yang berlaku tidaklah kaku melainkan fleksibel. Pemerintah berharap dengan peraturan ini masyarakat dapat membantu dan mendampingi setiap peserta didik yang ada di lingkungannya sehingga program JBM ini dapat membudaya di masyarakat.

Penerapan Jam Belajar Masyarakat pada masa pandemi ini cukup menjadi perhatian bagi Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta, karena pada saat ini jam belajar masyarakat dinilai cukup efektif dalam menunjang pembelajaran daring di rumah. Jam belajar masyarakat sebagai kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah cukup relevan dengan kondisi masyarakat saat ini. Pada metode pembelajaran jarak jauh (daring) ini, peserta didik diharuskan untuk melakukan pembelajaran secara mandiri di rumahnya masing-masing dan orang tua diharapkan mampu menciptakan suasana belajar yang kondusif. Tentu saja hal tersebut dapat didukung dengan memaksimalkan implementasi kebijakan jam belajar masyarakat.

Implementasi kebijakan jam belajar masyarakat di beberapa wilayah memperlihatkan kecenderungan terjadinya kesenjangan. Hal ini terlihat dengan adanya wilayah yang berhasil menerapkan program ini dengan baik dan juga adanya wilayah yang belum dapat menerapkan program ini dengan maksimal. Hal ini karena tingkat

partisipasi masyarakat di beberapa wilayah masih tergolong pasif. Masih banyak yang beranggapan bahwa program ini hanya sebatas “tulisan” saja. Untuk itu pada beberapa wilayah dapat dikatakan bahwa program ini kurang berjalan efektif.

Kesenjangan ini terjadi juga pada beberapa wilayah di Kemantren Umbulharjo. Kemantren Umbulharjo sendiri terdiri dari 7 kelurahan. Sebagai salahsatu kawasan yang potensial bagi Kota Yogyakarta, Kemantren Umbulharjo mempunyai luas sepertiga dari wilayah Kota Yogyakarta. Dengan demikian, Kemantren Umbulharjo menjadi wilayah yang sering menjadi sorotan pemerintah dalam melakukan implementasi dari setiap kebijakan pemerintah Kota Yogyakarta. Salahsatu kebijakan yang diterapkan pada wilayah Kemantren Umbulharjo yaitu Kebijakan Jam Belajar Masyarakat. Pada implementasinya, masih terdapat beberapa kelurahan yang belum dapat menerapkan kebijakan ini dengan maksimal.

Terdapat beberapa bentuk analisis kesenjangan yang digunakan dalam mengukur implementasi kebijakan JBM dengan tujuan dibentuknya kebijakan ini. Dalam konteks penelitian ini stakeholder yaitu dinas pendidikan bertindak sebagai perusahaan. Sementara itu, pendamping JBM, Pokja, dan masyarakat adalah pengguna. Dengan demikian, model kesenjangan dimodifikasi menjadi:

1. Kesenjangan antara persepsi masyarakat atas ekspektasi stakeholder akan pelayanan yang diberikannya dalam pengimplementasian Jam Belajar Masyarakat.
2. Kesenjangan antara persepsi masyarakat atas ekspektasi masyarakat itu sendiri akan pelayanan yang telah diberikan saat pengimplementasian JBM.
3. Kesenjangan antara persepsi masyarakat atas ekspektasi pokja akan kompetensi pokja yang diberikan oleh pokja tersebut ketiga melakukan pelayanan dalam pengimplementasian Jam Belajar Masyarakat.
4. Kesenjangan antara persepsi pokja atas ekspektasi pendamping JBM akan kompetensi pendamping JBM yang diberikan olehnya ketika melakukan monitoring.

Menurut Van Meter dan Van Horn implementasi merupakan tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu atau pejabat maupun kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan untuk mencapai sebuah tujuan yang telah digariskan dalam suatu keputusan kebijakan. Tindakan yang demikian termasuk dalam usaha untuk mengubah keputusan menjadi tindakan-tindakan yang bersifat operasional dalam jangka waktu yang telah ditentukan. Tindakan tersebut juga termasuk pada usaha-usaha untuk mencapai perubahan

besar maupun perubahan kecil yang telah ditetapkan dalam program.

Implementasi merupakan pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, kebijakan tersebut dapat berupa undang-undang namun dapat pula berupa perintah-perintah atau keputusan eksekutif yang penting atau badan peradilan lainnya. Keputusan tersebut mengidentifikasi masalah yang akan diatasi serta menjelaskan secara tegas tujuan atau sasaran yang ingin dicapai dengan berbagai cara yang terstruktur untuk mengatur proses implementasinya.

Para ahli berpendapat bahwa proses implementasi kebijakan pendidikan lebih rumit dan sangat kompleks jika dibandingkan dengan proses perumusannya. Proses implementasi kebijakan itu sendiri harus melibatkan perangkat politik, sosial, hukum, maupun administratif/organisasi yang berguna untuk mencapai suksesnya implementasi kebijakan pendidikan tersebut. Walaupun perumusan dan implementasi kebijakan pendidikan merupakan dua rangkaian proses yang terhubung (Rohman, 2009).

Van Meter dan Van Horn memulai gagasan teori tentang implementasi kebijakan dengan pertanyaan mengapa terdapat implementasi yang berhasil dan mengapa terdapat implementasi yang gagal. Pertanyaan tersebut selanjutnya dijawab dengan menyampaikan enam

variabel yang terdiri dari dua variabel utama dan empat variabel tambahan yang membentuk hubungan antara kebijakan dan kinerja dari kebijakan tersebut.

Keenam variabel yang dimaksudkan yaitu standar dan tujuan kebijakan, sumber daya, komunikasi, interorganisasi serta aktivitas pengukuhan, karakter agen pelaksana, kondisi sosial, ekonomi, politik, dan karakter pelaksana. Teori yang dikemukakan oleh Van Meter dan Van Horn ini ialah teori yang berasal dari pendapat bahwa perbedaan pada proses implementasi sangat dipengaruhi oleh sifat kebijakan. Hal ini dikarenakan tiap kebijakan memiliki karakteristik yang berbeda. Berikutnya mereka menginisiasi pendekatan yang didalamnya mencoba untuk menghubungkan isu kebijakan dengan implementasi serta suatu model konseptual yang terhubung antara kebijakan dengan prestasi kerja.

Menurut (Siswanto, 2012) menyatakan bahwa pendidikan merupakan tanggung jawab baik pemerintah maupun masyarakat. Kepedulian masyarakat pada pendidikan khususnya keluarga berhubungan erat dengan penentuan keberhasilan pendidikan, selain itu untuk mencapai sebuah tujuan pendidikan perlu adanya penanaman kedisiplinan belajar pada anak-anak.

Jam Belajar Masyarakat (JBM) merupakan upaya untuk mempromosikan

budaya belajar dengan menciptakan kondisi lingkungan yang ideal yang dapat mendorong proses belajar anak atau warga dan dapat dimanfaatkan dalam suasana aman, nyaman, tertib dan menyenangkan. Jam belajar masyarakat adalah kearifan penduduk setempat. Yogyakarta adalah kota pertama yang meluncurkan program tersebut. Slogan yang digunakan dalam program ini adalah sawiji (tujuan bersama), greget (semangat cita-cita), sengguh (Percaya diri meraih cita-cita) dan ora mingkuh (maju, pantang menyerah) adalah upaya meningkatkan kualitas dasar masyarakat Yogyakarta. Oleh karena itu, jam belajar masyarakat harus dilakukan dengan baik dan benar untuk meningkatkan kualitas pembelajaran di Yogyakarta dengan mengikuti semua kegiatan sosial yang ada.

Kebijakan yang diambil oleh banyak negara termasuk Indonesia dengan melibatkan seluruh aktivitas pendidikan, membuat pemerintah dan lembaga terkait harus menghadirkan alternatif proses pendidikan bagi peserta didik maupun mahasiswa yang tidak bisa melaksanakan proses pendidikan pada lembaga pendidikan. Hal ini didukung oleh Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2020. Prinsip yang diterapkan dalam kebijakan masa pandemi COVID-19 adalah “kesehatan dan keselamatan peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan, keluarga, dan masyarakat

merupakan prioritas utama dalam menetapkan kebijakan pembelajaran”. Sekolah mulai mengubah strategi pembelajaran yang awalnya adalah tatap muka menjadi pembelajaran non-tatap muka atau pembelajaran online.

Edaran tersebut juga mengarahkan agar siswa melakukan pembelajaran dari rumah dan dilaksanakan guna memberikan pengalaman belajar bagi siswa itu sendiri. Hal ini mengindikasikan bahwa terdapat peran penting orang tua dalam pemberian suasana kondusif guna mendukung proses pembelajaran pada anak. Tidak hanya orang tua, tetapi peran guru juga menjadi sorotan lantaran metode daring ini menuntut sisi kreativitas guru dalam mengajar.

METODE PENELITIAN

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan tujuan untuk memahami makna dibalik data yang terlihat. Dalam penelitian ini peneliti ingin memahami gejala sosial yang seringkali sulit diamati, sehingga diperlukan analisis data yang mendalam dan observasi interaksi sosial (Sugiyanto dalam Supriyanto, 2021). Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif yaitu peneliti mendeskripsikan dan menjelaskan objek yang sedang berlangsung.

Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian ini dimulai pada bulan Juli 2021 sampai bulan Mei 2022 dan dilaksanakan di Kemantren Umbulharjo Kota Yogyakarta.

Subjek Penelitian

Subjek dalam penelitian ini adalah warga Kemantren Umbulharjo, Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kota Yogyakarta, serta pendamping JBM. Sedangkan objek penelitian ini adalah penerapan kebijakan jam belajar masyarakat di Kemantren Umbulharjo Kota Yogyakarta.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini dengan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi.

Teknik Sampling

Pada penelitian kualitatif, banyaknya sampel bukan menjadi fokus utama. Hal ini dikarenakan pada penelitian kualitatif lebih mengutamakan kekayaan informasi. Dalam penelitian ini, digunakan teknik sampling yaitu Purposive Sampling dan Snowball Sampling.

Instrumen Penelitian

Penelitian ini yang menjadi instrumen penelitian adalah peneliti itu sendiri. Selain itu yang berperan untuk menentukan fokus penelitian,

mengklasifikasikan informasi ke dalam sumber data, mengumpulkan data dan mengevaluasi kualitas data yang akan digunakan, menganalisis data, menjelaskan makna data adalah peneliti itu sendiri (Sugiyono, 2010: 306). Dalam melakukan penelitian ini peneliti menggunakan tiga bentuk instrumen yaitu pedoman observasi, pedoman wawancara dan dokumen.

Teknik Analisis Data

Teknik analisis data kualitatif dilakukan selama proses penelitian berlangsung. Pada saat pengambilan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi peneliti sudah melakukan analisis data dengan cara menganalisis hasil jawaban yang diberikan informan. Miles dan Huberman (dalam Moelong 2000) menyatakan analisis data kualitatif memiliki empat tahapan kegiatan, diantaranya yaitu pengumpulan data, kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Keabsahan Data

Penelitian ini menggunakan uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif terdiri dari uji *credibility*, *transferability* (validitas eksternal), *dependability* (realibilitas), dan *confirmability* (obyektivitas).

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Profil Kemantren Umbulharjo

Kemantren Umbulharjo termasuk salahsatu Kemantren yang ada di Kota Yogyakarta. Kemantren ini terletak di selatan Kota Yogyakarta dan memiliki ketinggian 113 meter di atas permukaan laut, dengan luas wilayah sebesar 811,4800 Ha. Kemantren Umbulharjo termasuk dalam kawasan yang berpotensi di Kota Yogyakarta dengan luas kawasan yaitu sepertiga luas wilayah Kota Yogyakarta. Hal ini juga terlihat dari banyaknya kelurahan yang ada di Kemantren Umbulharjo yaitu sebanyak tujuh kelurahan, meliputi:

1. Muja Muju 5. Tahunan
2. Giwangan 6. Semaki
3. Sorosutan 7. Warungboto
4. Pandeyan

2. Kebijakan JBM pada Masa Pandemi di Kemantren Umbulharjo

Konsep yang mendasari dari implementasi kebijakan yaitu berpusat pada perilaku ataupun tindakan guna mencapai tujuan yang telah direncanakan dalam sebuah keputusan. Implementasi kebijakan pada dasarnya memiliki prinsip yaitu agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuan. Hal lain juga diungkapkan oleh Grindle yang menjelaskan bahwa implemmtasi kebijakan bukan hanya mengenai

mekanisme penjabaran dari keputusan politik ke dalam prosedur melalui birokrasi, namun implemmtasi kebijakan juga meliputi permasalahan konflik, aktor pemberi keputusan, dan sasaran dari kebijakan.

Konsep implemmtasi kebijakan yang dirumuskan oleh Van Meter dan Van Horn sering disebut dengan *A Model of the Policy Implementation* (1975). Van Meter dan Van Horn menjelaskan bahwa proses implementasi ialah hal yang abstrak atau permormansi dari sebuah kebijakan yang dilakukan dengan kesengajaan guna meraih kinerja implementasi kebijakan yang baik. Model yang dijelaskan oleh Van Meter dan Van Horn mengibaratkan bahwa implementasi kebijakan searah atau linear dengan keputusan politik, pelaksana, dan kinerja kebijakan. Model ini juga menjelaskan jika kinerja kebijakan dipengaruhi beberapa variabel yang berkaitan, variabel tersebut ialah:

a. Tujuan

Van Meter dan Van Horn menjelaskan bahwa untuk pengukuran kinerja implementasi kebijakan tentunya harus mempertimbangkan tujuan dan sasaran yang harus dicapai pelaksana kebijakan, kinerja tersebut pada intinya merupakan penilaian dari tingkat tercapainya tujuan dan sasaran tersebut.

Penelitian ini menemukan fakta bahwa tujuan awal disusunnya kebijakan

JBM di wilayah Yogyakarta telah dipahami oleh seluruh pelaksana maupun komponen yang terlibat dalam pelaksanaan JBM di Kemantren Umbulharjo. Hasil wawancara yang dilakukan pada Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kota Yogyakarta yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Cahyono, pendamping JBM Kemantren Umbulharjo, pendamping JBM Kelurahan se-Kemantren Umbulharjo memberi penjelasan yang sama mengenai tujuan diadakannya JBM yaitu untuk penciptaan kondisi lingkungan yang kondusif untuk belajar. Hal tersebut juga didukung dari penjelasan warga yang mengatakan bahwa dengan adanya JBM cukup membantu anak-anak usia sekolah dalam mendapatkan suasana kondusif untuk belajar terutama dalam masa pembelajaran jarak jauh seperti saat ini.

Peneliti juga mendapatkan hasil bahwa untuk program kegiatan JBM pada awal pandemi justru terhenti lantaran adanya pemberlakuan PPKM dan juga ketakutan warga mengenai virus Covid-19. Program yang berhenti yaitu program pendukung kebijakan JBM yang mengahruskan adanya kumpulan masa, namun untuk program utama di tiap kelurahan yang ada di Kemantren Umbulharjo yaitu pemberwaktuan jam belajar pada warga masih terus diusahakan untuk terlaksana. Hal tersebut lantaran masih dengan diberlakukannya model

pendidikan jarak jauh ini, banyak waktu anak-anak yang dihabiskan di rumah. Untuk itu, dinas berupaya untuk memanfaatkan keadaan ini agar pelaksanaan JBM dapat berjalan secara maksimal.

b. Sumber Daya

Kemampuan dalam pemanfaatan sumber daya yang tersedia di wilayah dapat mempengaruhi keberhasilan implementasi dari sebuah kebijakan. Manusia sebagai sumber daya yang terpenting untuk menentukan keberhasilan dalam pengimplementasian kebijakan. Tiap tahap implementasi mengahruskan adanya sumber daya manusia yang memiliki kualitas sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan oleh kebijakan yang telah berlakuk secara apolitik. Selain sumber daya manusia, sumber daya lingkungan juga menjadi perhitungan dalam menentukan keberhasilan dari implementasi sebuah kebijakan. Seperti yang dijelaskan oleh Derthicks (dalam Van Meter dan Van Horn, 1975) mengatakan bahwa: "*New town study suggest that the limited supply of federal incentives was a major contributor to the failure of the program*".

Hasil penelitian ini menemukan bahwa sumber daya manusia yang mendukung pelaksanaan JBM sudah tergolong partisipatif. Hanya saja terdapat beberapa kelurahan yang belum dapat maksimal dalam memanfaatkan sumber

daya manusia di wilayahnya. Jika dilihat dari jumlah pendamping di Surat Tugas yang terlampir dalam Laporan JBM Kemantren Umbulharjo pada tahun 2020 terdapat 17 orang pendamping JBM kelurahan dan 1 orang pendamping JBM kemantren. Namun, dalam rapat koordinasi yang diselenggarakan pada 22 November 2021 ditemukan bahwa di Kelurahan Tahunan masih sulit mengajak untuk ikut berpartisipasi dari tiap RW dan kesadaran wargapun masih tergolong minim. Sementara itu, di Kelurahan Sorosutan pun masih belum dapat maksimal dalam memanfaatkan sumber daya manusianya karena permasalahan pandemi dan terkendala dalam kaderisasi pokja. Tidak hanya kelurahan tersebut, kendala SDM dalam memaksimalkan kegiatan pendukung JBM juga dirasakan oleh Kelurahan Semaki, khususnya Semaki Kulon. Untuk wilayah yang sudah dapat memanfaatkan sumber daya manusia dengan baik sehingga JBM dapat berjalan dengan baik pula yaitu Kelurahan Warungboto, Giwangan, Muja Muju, dan Pandeyan. Walaupun di Kelurahan Pandeyan sendiri kegiatan masih kosong di beberapa RW. Kurang maksimalnya pemanfaatan SDM ini dilatarbelakangi karena pengetahuan mengenai esensi dan konsep JBM yang masih berbeda-beda (belum sama persepsi).

c. Organisasi

Fokus perhatian pada pelaksana kebijakan diantaranya terpusat pada organisasi formal dan informal yang terlibat. Hal tersebut penting dikarenakan implementasi sebuah kebijakan berkaitan erat dengan ciri yang tepat dan sesuai dengan pelaksananya. Hal tersebut berhubungan dengan konteks kebijakan yang akan dijalankan menuntut pelaksanaannya yang ketat dan disiplin. Konteks lain yang dibutuhkan oleh pelaksana kebijakan ialah demokratis dan persuasif. Selain hal tersebut, jangkauan luas wilayah menjadi pertimbangan yang tidak kalah penting dalam penentuan pelaksana kebijakan.

Penelitian ini menemukan hasil bahwa pengorganisasian yang dilakukan untuk pengimplementasian kebijakan JBM di Kemantren Umbulharjo sudah cenderung baik. Untuk pengorganisasian yang dilaksanakan pada tingkatan kemantren dilakukan dengan monitoring dan rapat dengan pendamping kelurahan. Dalam rapat tersebut seluruh pendamping kelurahan dapat mengemukakan permasalahan yang ada di tiap wilayah untuk dapat dicarikan solusi. Selain itu, pengorganisasian juga dilaksanakan secara struktural dengan dikelurakannya SK Pokja di tiap wilayah. Adanya SK ini memberikan isyarat bahwa telah disusun sebuah komunikasi secara struktural di tiap

wilayah. Hanya saja belum semua kelurahan memiliki SK Pokja. Seperti Kelurahan Tahunan dan Muja Muju yang belum mengeluarkan SK Pokja. Untuk wilayah kelurahan lain sudah dibentuk SK Pokja sebagai langkah pengorganisasian yang dilaksanakan di tiap kelurahan. Tidak hanya melalui SK, pengorganisasian di tiap kelurahan juga dilakukan dengan mengadakan rapat rutin dan juga evaluasi.

d. Komunikasi Antar Organisasi

Menurut Van Horn dan Van Meter menjelaskan agar kebijakan publik dapat berjalan secara efektif maka harus dipahami hal apa yang menjadi standar dan tujuan dari sebuah kebijakan. Maka dari itu, pertanggungjawaban atas pencapaian standar dan tujuan harus dikomunikasikan pada pelaksana. Komunikasi tersebut berupa penyampaian informasi mengenai standar dan tujuan yang harus konsisten dan seragam (*consistency and uniformity*).

Hasil penelitian yang dikemukakan oleh peneliti sebelumnya menjelaskan bahwa hubungan antar organisasi dalam hal ini Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kota Yogyakarta, pendamping JBM kemantren, dan pendamping JBM kelurahan sudah terjalin komunikasi. Komunikasi tersebut juga terlihat dari adanya rapat koordinasi yang diselenggarakan di Kemantren Umbulharjo. Rapat koordinasi tersebut membahas mengenai rencana dan juga

evaluasi mengenai pelaksanaan JBM di wilayah. Tidak hanya itu, komunikasi dan interaksi juga dilakukan masing-masing pendamping wilayah. Kendala komunikasi yang dilakukan oleh pendamping pada warga dirasakan di Kelurahan Tahunan dan Kelurahan Sorosutan. Hasil wawancara yang dilakukan peneliti menyimpulkan bahwa pada Kelurahan Tahunan, pendamping hanya dapat menjelaskan kegiatan yang ada di RW 5 saja sementara RW lainnya diakui oleh pendamping bahwa belum dikomunikasikan, sementara di Kelurahan Sorosutan, pendamping belum dapat melakukan komunikasi langsung pada tiap RW dengan alasan pandemi.

e. Sikap Para Pelaksana

Van Meter dan Van Horn menjelaskan bahwa sikap penerimaan ataupun penolakan dari pelaksana kebijakan merupakan hal yang sangat berpengaruh dalam keberhasilan dan juga kegagalan dalam mengimplementasikan sebuah kebijakan. Hal ini dikarenakan sebuah kebijakan bukan hasil dari formulasi warga setempat melainkan hasil dari keputusan stakeholder. Biasanya sebuah kebijakan juga akan sulit untuk diterima oleh masyarakat karena sifat dari perumusan kebijakan yang top-down dan sangat mungkin jika pengambil keputusan tidak mengetahui bahkan tidak mampu menyentuh permasalahan yang ada di lapangan.

Sikap para pelaksana dalam kebijakan JBM di Kemantren Umbulharjo cenderung terlihat menerima kebijakan tersebut. Penelitian menemukan hasil bahwa sikap dari pelaksana dalam hal ini pendamping JBM kemantren, pendamping JBM kelurahan, dan warga secara keseluruhan sudah bersinergi untuk menyukseskan program JBM di wilayahnya. Hasil wawancara oleh pendamping JBM kemantren menjelaskan bahwa kerjasama sudah terjalin dari kemantren dan juga pada masing-masing kelurahan. Dari pihak kemantren pun telah melakukan pendampingan dan juga monitoring dalam pelaksanaan JBM di tiap kelurahan. Pendampingan juga dilakukan oleh pendamping di masing-masing kelurahan. Dalam melakukan pendampingan tentu saja dibutuhkan keaktifan dalam melakukan komunikasi pada pokja di tiap RW. Namun, dalam pendampingannya ditemukan fakta bahwa terdapat pendamping yang belum aktif dalam melakukan pendampingan. Hal ini terjadi pada Kelurahan Tahunan, hal ini juga sesuai dengan belum terkumpulnya laporan JBM Kelurahan Tahunan. Selain dari pendamping, pelaksana JBM disini juga melihat dari sisi warga di Kemantren Umbulharjo. Hasil dari observasi dan wawancara didapatkan bahwa masih terdapat kecenderungan sikap pasif warga dalam pelaksanaan JBM. Hal ini menurut para

pendamping juga berhubungan dengan kondisi pandemi yang masih ditakutkan oleh warga. Bahkan di beberapa kelurahan seperti Warungboto, Sorosutan, Muja Muju, dan Tahunan masih terdapat beberapa RW yang belum memiliki SK Pokja. Untuk tingkat partisipasi warga di beberapa kelurahan seperti Kelurahan Tahunan dan Muja-Muju masih terkendala pasifnya warga. Hal berbeda terlihat pada Kelurahan Giwangan dan Warungboto justru sudah terlihat keaktifan warganya dalam melaksanakan program pendukung JBM.

f. Lingkungan Sosial, Politik, dan Ekonomi

Hal terakhir yang menjadi perhatian dalam pengimplementasian sebuah kebijakan ialah mengenai keadaan lingkungan eksternal. Hal tersebut karena lingkungan eksternal ikut mendorong tingkat keberhasilan dari sebuah kebijakan. Lingkungan sosial, ekonomi, dan politik yang tidak kondusif dapat berdampak negatif dan menjadi pemicu kegagalan implementasi dari sebuah kebijakan.

Keadaan sosial, ekonomi, dan politik dari warga Kemantren Umbulharjo cenderung bervariasi. Dari segi sosial, Kemantren Umbulharjo didominasi dengan perkampungan padat penduduk yang menjadikan warganya cenderung saling aktif dalam berkomunikasi. Hal ini juga terlihat dari partisipasi warga Kemantren

Umbulharjo di beberapa wilayah dalam mengimplementasikan program pendukung JBM. Seperti pada Kelurahan Giwangan, dalam observasi yang dilakukan oleh peneliti terlihat warga cenderung aktif dalam melakukan kegiatan pendukung JBM. Hal lain yang juga terlihat di Kelurahan Giwangan yaitu komunikasi antara pendamping kelurahan dengan warga yang terjalin dengan baik. Selain di Kelurahan Giwangan, juga terlihat kondisi sosial yang baik pada Kelurahan Warungboto, Semaki, dan Pandeyan. Pada ketiga kelurahan tersebut, adanya hubungan sosial yang baik antara warga dan elemen pendamping menjadi sebuah nilai tambahan tersendiri lantaran dengan adanya hal tersebut, sebagian besar wilayahnya sudah dapat menjalankan program pendukung JBM dengan baik. Wilayah yang masih kesulitan dalam pengimplementasian JBM dikarenakan kondisi sosial warganya yang masih sulit untuk diajak berperan secara aktif di program JBM yaitu Kelurahan Tahunan dan Kelurahan Muja Muju, dan Sorosutan

Kondisi ekonomi warga di Kemantren Umbulharjo cenderung bervariasi. Data yang diperoleh dari web <https://kependudukan.jogjaprovo.go.id/> dapat diketahui bahwa jenis pekerjaan yang mendominasi di kalangan warga Kemantren Umbulharjo yaitu karyawan swasta dengan jumlah 14.180 orang dan

disusul dengan jenis pekerjaan wiraswasta yaitu sebanyak 9.663 orang. Data tersebut merupakan data tahun per Desember 2021. Hal tersebut dapat diartikan bahwa kondisi ekonomi dari warga Kemantren Umbulharjo didominasi oleh golongan menengah. Walaupun demikian, terdapat pula warga usia kerja yang belum bekerja sebanyak 2.672 orang. Dengan jumlah yang bervariasi dan jenis yang bervariasi ini tentu saja akan berdampak pada implementasi kebijakan JBM di wilayah ini. Fakta di lapangan mengungkapkan semakin banyak warga yang berada di golongan ekonomi menengah ke atas maka akan berdampak dalam pengadaan program pendukung JBM di wilayah tersebut. Hal tersebut dikarenakan warga yang berada pada golongan ekonomi menengah ke atas mayoritas membantu akomodasi dalam kelancaran program di wilayah.

Kondisi lingkungan dari masing-masing wilayah yang ada di Kemantren Umbulharjo juga berbeda-beda. Seperti di Kelurahan Giwangan, yang pada beberapa RW masih kurang dalam hal sarana dan prasarana berupa gedung pertemuan. Selain itu, wilayah Kelurahan Giwangan yang berbatasan langsung dengan Ringroad dan juga wilayah pasar berdampak pada kondisi warganya. Lingkungan pasar yang sering dikenal sebagai lingkungan “buruk” justru dibuktikan dengan adanya JBM dapat merubah pola belajar warganya. Selain itu,

kondisi lingkungan berupa adanya TBM yang dinilai dinas dapat menjadi sebuah ukuran aktif atau tidaknya kegiatan belajar masyarakat juga bervariasi. Hasil dari penelitian ini terlihat bahwa di Kelurahan Pandeyan belum memiliki TBM. Adanya TBM ini diharapkan dapat membantu pelaksanaan JBM dari segi sarpras dan juga SDM.

2. Analisis Kesenjangan Implementasi Kebijakan Jam Belajar Masyarakat pada Masa Pandemi di Kemantren Umbulharjo

Analisis kesenjangan atau *gap analysis* pendidikan pada penelitian ini menghasilkan data bahwa terdapat kesenjangan yang terjadi antar kelurahan. Kesenjangan tersebut dapat berupa poin 1,2,3,4 seperti penjelasan di atas. Adanya kesenjangan tersebut terlihat dari pengimplementasian JBM yang berbeda di tiap kelurahan yang ada pada Kemantren Umbulharjo. Untuk melihat sejauh mana kesenjangan yang terjadi pada pengimplementasian JBM di tiap kelurahan yang ada di Kemantren Umbulharjo, peneliti menggolongkan beberapa aspek yang dinilai berpengaruh dalam keberhasilan pengimplementasian JBM di tiap kelurahan yang ada pada Kemantren Umbulharjo. Penilaian aspek dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi menemukan hasil sebagai berikut :

1. Adanya penanda JBM di wilayah

Hasil yang ditemukan mengatakan bahwa di tiap kelurahan yang ada pada Kemantren Umbulharjo sudah memiliki penanda JBM. Penanda tersebut bervariasi di tiap wilayah, namun rata-rata bentuk dari penanda tersebut ialah plang yang dipasang di tiap RW yang ada di masing-masing kelurahan. Selain plang, penanda lain yang ditemukan di wilayah Kemantren Umbulharjo ialah banner dan juga stiker ajakan untuk ikut berpartisipasi dalam program JBM.

2. Adanya kegiatan sosial masyarakat di wilayah

Hasil yang ditemukan dalam menjawab aspek ini di tiap kelurahan juga berbeda-beda. Kelurahan yang sebagian besar sudah aktif dalam menjalankan kegiatan yaitu Kelurahan Giwangan, Warungboto, dan Pandeyan. Dengan catatan kegiatan yang ada di Kelurahan Pandeyan masih terdapat kekosongan di beberapa RW. Sementara itu pada Kelurahan Semaki 60% kegiatan off selama pandemi. Hal ini juga terjadi di Kelurahan Tahunan yang baru mulai kembali melakukan kegiatan pada Bulan Oktober 2021 berupa pelatihan dan diikuti oleh kegiatan TPA. Pada Kelurahan Sorosutan didominasi oleh kegiatan keagamaan selama pandemi. Untuk Kelurahan Muja Muju, program pendukung JBM juga sulit dilaksanakan karena kendala pandemi.

3. Berkurangnya PEKAT (Penyakit masyarakat) di wilayah

Untuk permasalahan PEKAT di wilayah Kemantren Umbulharjo juga sangat bervariasi. Untuk Kelurahan Giwangan sendiri, adanya JBM dirasakan oleh warga dan juga pendamping JBM kelurahan berpengaruh pada keberadaan PEKAT. Kegiatan warga yang semula berada di arah negatif, dapat ditarik perlahan menjadi ke arah yang lebih positif dengan pendekatan JBM. Sementara itu, pada Kelurahan Tahunan dikatakan bahwa JBM tidak berperan secara langsung dalam memberantas PEKAT. Hal tersebut karena sudah terdapat wewenang dari lembaga lain dalam penanganannya. Berkurangnya PEKAT juga dapat dihubungkan dengan partisipasi dan intensitas kegiatan yang dilakukan di wilayah. Untuk kelurahan Warungboto adanya JBM cukup membantu warganya dalam melakukan aktivitas positif dan meminimalisir kegiatan negatif yang dilakukan warganya. Hal ini juga diikuti dengan Semaki yang dengan adanya JBM dapat dikatakan berpengaruh dengan pengurangan PEKAT. Hal berbeda terlihat pada ketiga kelurahan lain yaitu Pandeyan, Sorosutan, dan Muja Muju. Ketiga kelurahan ini sama seperti Kelurahan Tahunan yang dalam pengimplementasian JBM nya belum berpengaruh pada PEKAT.

4. Adanya SK pokja

Sesuai dengan laporan JBM Kemantren Umbulharjo pada tahun 2021 diketahui bahwa :

Tabel 1. SK Pokja

Kelurahan	SK Pokja
Warungboto	8 SK
Giwangan	12 SK
Pandeyan	12 SK
Sorosutan	10 SK
Semaki	10 SK
Muja Muju	-
Tahunan	-

(Laporan JBM Kemantren Umbulharjo 2021)

Hasil laporan tersebut memperlihatkan bahwa masih terdapat 2 kelurahan yang belum memiliki SK Pokja untuk wilayahnya. Sementara itu, kelurahan lain mayoritas sudah memiliki SK Pokja walaupun masih terdapat beberapa RW yang belum memiliki SK di wilayah tersebut.

5. Adanya SDM yang mendukung terlaksananya JBM

Aspek Sumber Daya Manusia yang ditemukan peneliti dalam penelitian ini antara lain :

- Kelurahan Giwangan : Cenderung aktif dan mendukung, walaupun masih ada beberapa wilayah yang warganya pasif. Selain itu, di dua RW yang ada di Kelurahan Giwangan juga masih ditemukan kesulitan dalam melakukan regenerasi Pokja.
- Kelurahan Warungboto : Warga juga turut berpartisipasi dalam kegiatan, namun masih

terdapat warga yang masih belum memahami JBM.

- Kelurahan Pandeyan : Warga sudah mulai berpartisipasi, tetapi masih terdapat kekosongan di beberapa RW.

- Kelurahan Semaki : Dominasi kegiatan masih berada di RW 6, warga sudah mulai berpartisipasi.

- Kelurahan Sorosutan : Masih mengalami kesulitan dalam regenerasi Pokja

- Kelurahan Tahunan : Keterlibatan pada tiap RW masih sulit, kesadaran warga masih kurang.

- Kelurahan Muja Muju : Sebelum pandemi warga cenderung aktif, tetapi semenjak pandemi warga menjadi cenderung pasif.

6. Adanya asosiasi/lembaga yang dapat mendukung kebijakan JBM

Hasil dari pengamatan pada laporan JBM Kemantren Umbulharjo pada tahun 2021 ditemukan bahwa :

Tabel 2. Jumlah Lembaga

Kelurahan	Jumlah Lembaga/Asosiasi
Semaki	4 lembaga
Pandeyan	1 lembaga
Giwangan	9 lembaga
Warungboto	3 lembaga
Tahunan	2 lembaga
Sorosutan	3 lembaga
Muja Muju	2 lembaga

(Sumber : Laporan JBM Kemantren Umbulharjo Tahun 2021)

Lembaga-lembaga tersebut bervariasi mulai dari lembaga keagamaan, sosial, dan lembaga kesenian. Kerjasama

yang dilakukan oleh pendamping JBM kelurahan tidak hanya kerjasama dalam bentuk formal saja, tetapi juga kerjasama dalam bentuk nonformal.

7. Adanya TBM (Taman Baca Masyarakat)

Tabel 3. Jumlah TBM

Kelurahan	TBM
Warungboto	6 TBM
Giwangan	1 TBM
Pandeyan	-
Sorosutan	4 TBM
Semaki	4 TBM
Muja Muju	1 TBM
Tahunan	1 TBM

(Sumber : Laporan JBM Kemantren Umbulharjo tahun 2021)

8. Adanya infrastruktur fisik/ SDA yang mendukung terlaksananya JBM

Mengenai infrakstruktur/SDA di masing-masing wilayah memiliki perbedaan, perbedaan tersebut diantaranya :

- Kelurahan Giwangan : Masih terdapat 4 RW yang belum memiliki Balai RW/ gedung serbaguna, terdapat fasilitas Perpustakaan Keliling

- Kelurahan Tahunan : Adanya pinjaman tempat untuk berkegiatan dari UST.

- Kelurahan Muja Muju : Di tiap RW terdapat aula, terdapat Rumah Singgah Ahmad Dahlan sebagai pusat belajar.

- Kelurahan Sorosutan : Terdapat Masjid yang dapat digunakan sebagai pusat kegiatan.

- Kelurahan Semaki : Terdapat balai dan juga TBM untuk pusat belajar.

- Kelurahan Pandeyan : Terdapat Balai RW yang sekaligus dijadikan TBM.

- Kelurahan Warungboto : Terdapat beberapa TBM yang tersebar di beberapa wilayah Kelurahan Warungboto sebagai pusat kegiatan.

9. Adanya usaha ekonomi yang mendukung terlaksananya JBM

Mengenai usaha ekonomi yang mendukung terlaksananya JBM di Kemantren Umbulharjo secara keseluruhan belum ada. Seluruh bentuk pembiayaan maupun fasilitas masih mengandalkan swadaya dari warga sekitar.

10. Adanya kegiatan berbasis budaya yang mendukung terlaksananya JBM

Kegiatan berbasis budaya yang ada di wilayah Kemantren Umbulharjo berbeda-beda di tiap kelurahan. Jika diuraikan kegiatan berbasis budaya di tiap kelurahan adalah sebagai berikut :

- Kelurahan Giwangan : Hadroh, karawitan, tari

- Kelurahan Tahunan : -

- Kelurahan Muja Muju : Tari

- Kelurahan Sorosutan : -

- Kelurahan Semaki : Sanggar Tari

- Kelurahan Pandeyan : -

- Kelurahan Warungboto : Karawitan

11. Adanya kegiatan berbasis agama yang mendukung terlaksananya JBM

Kegiatan berbasis agama yang ada di wilayah Kemantren Umbulharjo berbeda-beda di tiap kelurahan. Jika diuraikan

kegiatan berbasis budaya di tiap kelurahan adalah sebagai berikut :

- Kelurahan Giwangan : TPA, Gemaji, Madin

- Kelurahan Tahunan : TPA

- Kelurahan Muja Muju : -

- Kelurahan Sorosutan : TPA

- Kelurahan Semaki : -

- Kelurahan Pandeyan : TPA

- Kelurahan Warungboto : Qosidah

Berdasarkan fakta di atas maka jika dari aspek-aspek tersebut digolongkan menjadi beberapa golongan sesuai dengan standar yang sudah peneliti rumuskan yaitu:

1. Wilayah maju : Terdapatnya aspek-aspek di atas dan adanya kegiatan aktif yang dilakukan masyarakat dalam aspek-aspek tersebut.

2. Wilayah berkembang : Terdapatnya aspek-aspek di atas, tetapi tidak adanya kegiatan aktif yang dilakukan masyarakat dalam aspek-aspek tersebut.

3. Wilayah kurang berkembang : Tidak adanya aspek-aspek tersebut serta tidak adanya kegiatan aktif yang dilakukan masyarakat dalam aspek-aspek tersebut.

Maka, dapat ditemukan hasil sebagai berikut :

1. Wilayah Maju : Giwangan dan Warungboto

2. Wilayah Berkembang : Semaki dan Pandeyan

3. Wilayah kurang berkembang : Tahunan, Sorosutan, dan Muja Muju

3. Faktor Pendukung

Faktor pendukung dalam pelaksanaan JBM di Kemantren Umbulharjo diantaranya yaitu warga masih dengan senang hati mendukung keberadaan JBM untuk mendukung pendidikan di lingkungan masyarakat. Faktor lain yang mendukung implementasi JBM di Kemantren Umbulharjo adalah adanya kesepakatan mengenai pelaksanaan JBM tiap wilayah kelurahan. Kesepakatan ini tentu saja merupakan bagian penting dalam melakukan implementasi karena akan terdapat komunikasi dua arah antar pihak. Selain itu, adanya TBM dan ruang berkumpul dapat menjadi faktor pendukung untuk melaksanakan kegiatan. Hal tersebut tentu saja akan mempermudah warga untuk dapat belajar dan juga berkegiatan sesuai dengan program yang digalakan oleh pokja di masing-masing RW. Tidak hanya itu saja, adanya dukungan dari pihak-pihak Hal lainnya yang menjadi faktor pendukung ialah masih banyak warga yang peduli mengenai pendidikan di lingkungannya. Kepedulian ini yang dapat menghidupkan kembali JBM di masyarakat. Dengan adanya kepedulian warga mengenai pendidikan terutama di masa pandemi seperti saat ini menjadi hal penting untuk keberlangsungan JBM.

4. Faktor Penghambat

Faktor penghambat implementasi kebijakan JBM di beberapa wilayah yaitu di beberapa wilayah peran warga masih cenderung pasif dan hanya mengandalkan pokja saja dalam pembentukan kegiatan. Hal tersebut menjadikan kegiatan akan berjalan, hanya jika pokja aktif dalam menyelenggarakan kegiatan. Komitmen menjalankan program di tiap wilayah yang masih pasang-surut. Hal tersebut menjadikan beberapa wilayah tidak konsisten dalam melaksanakan JBM dan menyebabkan kegiatan JBM tidak dapat berlangsung lama. Masih diperlukannya perluasan jaringan kemitraan terutama pada pihak-pihak di luar wilayah. Jaringan kemitraan ini masih harus diperluas agar dukungan terhadap kegiatan JBM dapat terus berjalan. Faktor lain yang menjadi penghambat ialah pada beberapa wilayah masih ditemukan komunikasi antara pokja dengan warga yang masih belum berjalan baik, terdapat banyak pendidik yang diharapkan dapat membantu pelaksanaan JBM di wilayahnya namun pada kenyatannya kurang peduli, masih kurangnya kesadaran anak untuk ikut melaksanakan JBM, adanya perbedaan persepsi mengenai kegiatan yang termasuk dalam JBM, dan adanya pandemi Covid-19.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

1. Implementasi Kebijakan Jam Belajar Masyarakat di Kemantren Umbulharjo sudah berjalan sesuai dengan tujuan awal dibentuknya JBM. Hanya saja, disaat pandemi terjadi mayoritas kelurahan yang ada di Kemantren Umbulharjo memberhentikan kegiatan pendukung JBM tersebut. Kegiatan utama JBM yaitu penciptaan suasana kondusif di rumah pun tidak terlalu berjalan dengan baik. Hal tersebut dikarenakan masih banyaknya warga yang takut terhadap wabah Covid-19.

2. Faktor yang mendukung implementasi JBM di Kemantren Umbulharjo adalah adanya kesepakatan mengenai pelaksanaan JBM tiap wilayah kelurahan. Dengan adanya kesepakatan tersebut juga mempermudah untuk pemenuhan sarana dan prasarana pendukung kegiatan JBM. Selain itu, adanya TBM dan ruang berkumpul dapat menjadi faktor pendukung untuk melaksanakan kegiatan. Sementara itu, terdapat pula faktor penghambat implementasi kebijakan JBM di Kemantren Umbulharjo yaitu di beberapa wilayah peran warga masih cenderung pasif dan hanya mengandalkan pokja saja dalam pembentukan kegiatan. Faktor lain yang menjadi penghambat ialah pada beberapa

wilayah masih ditemukan komunikasi antara pokja dengan warga yang masih belum berjalan baik, terdapat banyak pendidik yang diharapkan dapat membantu pelaksanaan JBM di wilayahnya namun pada kenyatannya kurang peduli, masih kurangnya kesadaran anak untuk ikut melaksanakan JBM, adanya perbedaan persepsi mengenai kegiatan yang termasuk dalam JBM, dan adanya pandemi Covid-19.

3. Implementasi JBM di Kemantren Umbulharjo memiliki perbedaan di tiap kelurahan. Perbedaan yang mengindikasikan adanya kesenjangan implementasi tersebut terjadi dikarenakan pada tiap kelurahan, kegiatan tergantung oleh keaktifan pokja dan monitoring dari pendamping kelurahan masing-masing. Selain itu, hal yang paling mendasari adanya kesenjangan implementasi JBM di Kemantren Umbulharjo adalah perbedaan persepsi mengenai JBM yang dialami oleh pendamping, pokja, dan masyarakat itu sendiri.

Saran

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka saran yang diberikan oleh peneliti antara lain :

1. Bagi Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kota Yogyakarta

Pihak Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kota Yogyakarta dapat melakukan sosialisasi kembali terhadap pendamping dan juga warga mengenai konsep JBM. Sosialisasi tersebut dilandaskan karena terlihat pada beberapa wilayah bahwa masih sering terjadi perbedaan persepsi mengenai JBM itu sendiri.

2. Bagi pendamping JBM

Bagi pendamping JBM dapat melakukan peningkatan monitoring dan juga evaluasi terhadap pelaksanaan JBM di tiap kelurahan yang ada di Kemantren Umbulharjo.

3. Bagi Masyarakat

Bagi masyarakat dapat mengikuti kegiatan JBM dengan aktif dan turut berpartisipasi langsung kedalam tiap akitiitas JBM.

DAFTAR PUSTAKA

- Moelong, L. (2000). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. PT. Remaja Rosdakarya.
- Rohman, A. (2009). *Politik Ideologi Pendidikan*. Laksbang Mediatama.
- Siswanto, W. (2012). *Membudayakan JBM (Revitalisasi JBM Sarana Pembangunan)*. Dikpora - Sosialisasi JBM tahun 2012.
- Supriyanto, S. (2021). Pengembangan Media Permainan Tradisional Dakon Berbasis Teori Bruner. *Joyful Learning Journal*, 10(2), 61–65. <https://doi.org/10.15294/jlj.v10i2.512>

66

Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan dalam Masa Darurat Penyebaran Corona Virus Disease (Covid-19).
Surat Keputusan Gubernur DIY Nomor 93 Tahun 1999.